



---

## **Pacem In Terris dalam Kebijakan Luar Negeri Tahta Suci Vatikan terhadap Konflik Suriah**

**Nadya Yolanda Nainggolan, Mohamad Rosyidin, Muhammad Faizal Alfian**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Syrian conflict was one of the effects of the Arab Spring and has been evolving into a proxy war and get prolonged. Among many actors who are active and has their own interest in the international politics, the Holy See came to fight for peace in Syria. This study aimed to explain the reason why the Holy See was getting involved in pursuing peace in Syria. This research used a desk research method with an explanative type. This study used the theory of constructivist norms and the concept of foreign policy. Constructivism assumed that norms, one of which is domestic norms adopted by a country, can influence the interests of a country and affect the foreign policy. In this case, Pacem In Terris, as one of the encyclicals in Catholic social teaching, has become one of the domestic norms of the Holy See. Therefore, this study found out that Pacem In Terris was the domestic norm of the Holy See affected the interests of the Holy See to fight for peace in peaceful ways and then as a 'map' that influenced the policy of the Holy See to participated through several foreign policies towards Syria.*

**Keywords:** *Pacem In Terris, Syrian Conflict, Holy See, Constructivism, Norms.*

### **PENDAHULUAN**

Merebaknya Arab Spring merupakan salah satu fenomena internasional yang terjadi pada wilayah Timur Tengah di tahun 2011 dan bertujuan untuk mengubah pemerintahan yang otoriter menjadi demokratis. Tujuan ini pertama kali tercapai di Tunisia dan diikuti oleh Mesir yang berhasil menumbangkan dua rezim di negara tersebut (Al Jazeera, 2020). Berkaca dari keberhasilan ini, Suriah kemudian mencoba mengikuti langkah dari Tunisia dan Mesir untuk menumbangkan rezim Assad yang otoriter menjadi demokratis. Namun, harapan dari masyarakat Suriah ini tidak sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan respon represif dari pemerintahan Assad dalam menanggapi demonstrasi damai yang dilakukan oleh masyarakat Suriah yang berujung pada perang sipil (Ford, 2019). Adapun respon represif yang dilakukan oleh pihak pemerintah menyebabkan banyaknya korban jiwa yang jatuh. Pemerintah merespon dengan cara-cara kekerasan seperti menurunkan tentara serta polisi-polisi untuk melakukan penangkapan terhadap aktivis dalam demonstrasi tersebut (Kamrullah & Rivai, 2019). Adanya kekerasan langsung terjadi seperti pembantaian oleh pihak pemerintah untuk menekan demonstran dengan menggunakan senjata-senjata militer menyebabkan jumlah korban tewas mencapai 511.000 jiwa (Human Right Watch, 2019).

Dalam menanggapi fenomena tersebut, berbagai aktor internasional akhirnya turun tangan untuk membantu mencapai penyelesaian dan perdamaian di Suriah. Baik negara-negara dan organisasi internasional turut untuk memperjuangkan perdamaian di Suriah. Salah satunya PBB dengan membentuk UNSMIS atau *United Nations Supervision Mission in Syria* pada tahun 2012 yang bertugas untuk memantau penerapan gencatan senjata di Suriah, dengan mengeluarkan tiga draft resolusi pada Oktober 2011, hingga penggabungan pasukan pemeliharaan perdamaian dari PBB dan Liga Arab (Herlambang, 2015). Bukan hanya itu, bantuan dari negara lain untuk membantu perdamaian Suriah juga turut dilakukan oleh Amerika Serikat dengan melakukan intervensi kemanusiaan seperti mengirimkan pasukan militer lebih dari 400 orang untuk mengusir kelompok militan seperti ISIS di Suriah (Gordon, 2017). PBB dan Uni Eropa juga turut melaksanakan konferensi di Brussels untuk mendorong adanya perundingan damai dan memobilisasi bantuan kemanusiaan bagi Suriah (VOA Indonesia, 2018). Tiongkok juga berperan dalam menyelesaikan konflik Suriah melalui *multifaced intervention* dengan mengirimkan diplomatik khusus yang mendorong pihak-pihak bertikai untuk membentuk rancangan negosiasi serta pemberian bantuan khusus (Permadi, 2019).

Namun, banyaknya aktor yang terlibat tidak jarang didorong oleh adanya kepentingan nasionalnya yang ingin dilindungi. Hal ini terdapat dalam beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian skripsi dari Muhammad Agil Mahasin yang berjudul “Peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Suriah)” menemukan bahwa resolusi dari PBB tidak dapat terlaksana efektif dikarenakan lemahnya kemampuan mengikat dari resolusi tersebut yang bersumber dari kepentingan politik anggota, salah satu contohnya Rusia yang kemudian menyebabkan Rusia mengeluarkan veto atas resolusi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingannya (Mahasin, 2017). Kepentingan ini didukung dengan penelitian dari Dita Arum Kusumastuti yang berjudul “Alasan Rusia Melibatkan Diri dalam Konflik Bersenjata Suriah Tahun 2011-2015” yang menemukan bahwa Rusia melibatkan diri dalam konflik Suriah ini disebabkan karena alasan geopolitik untuk membendung pengaruh dari Amerika Serikat di kawasan dan menjaga kepentingan militernya (Kusumastuti, 2017). Hal yang sama juga terjadi pada Tiongkok, seperti pada penelitian oleh Permadi dalam Peran Tiongkok Dalam Konflik Suriah: Perspektif Teori *Quasi Mediation*” menemukan bahwa Tiongkok turut berperan dalam mencapai resolusi di Suriah tidak lain didorong oleh adanya kepentingan untuk menjaga kepentingan geoekonominya akan BRI (*Belt Road Initiative*) di Timur Tengah (Permadi, 2019).

Walaupun demikian, Tahta Suci Vatikan hadir sebagai angin segar, yang hadir murni untuk mencapai perdamaian di Suriah tanpa didorong oleh kepentingan ala realis. Hal ini didukung oleh adanya penelitian dari Rivera (2016) dalam “*The Holy See and International Conflict Resolution and Peacekeeping*” dan Newman (2019) dalam “*The Holy See and the Syrian Refugee Crisis: A Study of the Catholic Church's Soft Power*” yang menemukan bahwa Tahta Suci Vatikan sudah memiliki *track record* yang berperan dalam menyelesaikan konflik internasional dan mewujudkan perdamaian berdasarkan ajaran sosial gereja yang diamini. Berbagai peran ini dibahas dalam penelitian tersebut, namun dikarenakan konflik yang dibahas cukup banyak, sehingga belum berfokus pada satu kasus dan hanya membahas secara umum.

Berdasarkan kajian dari beberapa penelitian terdahulu di atas, terdapat kekosongan penelitian pada analisis peran dari suatu negara yang tidak didorong oleh kepentingan material ala realis. Belum ada yang meneliti alasan suatu negara yang turut berperan yang

didorong oleh adanya norma yang dianut dari suatu aktor pada sebuah konflik yang satu dan spesifik. Melalui penelitian inilah, penulis akan menganalisis alasan mengapa Tahta Suci Vatikan melibatkan diri dalam mencapai perdamaian di Suriah serta bagaimana kebijakan yang dikeluarkan.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dibalik keterlibatan Tahta Suci Vatikan dalam konflik Suriah dari sudut pandang paradigma konstruktivis dengan konsep norma dan bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan Tahta Suci Vatikan. Hal ini dikarenakan konsep norma menyediakan penjelasan alasan dari Tahta Suci Vatikan, dimana norma merupakan salah satu gagasan ideasional penting dan menjadi faktor determinan yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara dalam bertindak di panggung internasional. Adapun jenis norma yang digunakan dalam penelitian ini ialah norma *Pacem In Terris* sebagai salah satu norma domestik di Tahta Suci Vatikan.

## PEMBAHASAN

### Pilar Perdamaian dalam *Pacem In Terris* Sebagai Norma Domestik

Konstruktivis memandang bahwa dimensi ideasional atau gagasan yang termanifestasi dalam beberapa bentuk, baik misalnya budaya, identitas, norma, bahasa, dan sebagainya dipandang lebih penting daripada dimensi material karena arti penting material itu terletak pada pemaknaannya atau penafsiran oleh masing masing aktor yang kemudian akan mempengaruhi tindakan negara tersebut (Wendt, 1999). Norma merupakan salah satu konsep kunci perspektif konstruktivisme dalam hubungan antarnegara, yang menjadi pedoman negara dalam bertindak. Norma diartikan sebagai **harapan bersama tentang perilaku pantas** yang dianut oleh kumpulan aktor (Finnemore M. , 1996). Artinya disini, segala aktor dalam hubungan internasional, terutama negara, bertindak karena dituntun oleh adanya aturan atau prinsip atau norma yang telah disepakati yang memandu negara bertindak dengan perilaku yang baik atau pantas (*logic of appropriateness*). Konstruktivis memandang bahwa kepentingan nasional suatu negara merupakan derivasi dari norma yang dimiliki atau diamini negara tersebut (Rosyidin, 2012) Norma sendiri dibagi menjadi dua, yakni norma domestik dan norma internasional. Norma domestik merupakan norma yang memiliki berlaku dalam suatu negara tertentu saja, sedangkan norma internasional berlaku dalam skala lebih dari satu negara. Norma domestik ini bisa saja berupa undang-undang, konstitusi ataupun peraturan pemerintah. Adanya norma domestik ini kemudian akan mempengaruhi kepentingan dan kebijakan luar negeri suatu negara, dikarenakan norma merupakan aturan, standar, atau prinsip yang merupakan resep tindakan dalam situasi tertentu dan sebagai rasa kewajiban yang harus diikuti (Hurrel, 2002).

Adapun salah satu norma domestik yang dimiliki oleh Tahta Suci Vatikan ialah ensiklik *Pacem In Terris*. Merupakan salah satu norma yang disahkan dalam bentuk ensiklik yang digagas oleh Paus Yohannes XII. *Pacem In Terris* yang didefinisikan sebagai “Perdamaian di Bumi”, lahir dari kondisi dunia yang sedang perang, tepatnya ketika perang dunia I. Ensiklik yang lahir dari Konsili Vatikan II tersebut menjadi salah satu ensiklik yang sangat berpengaruh di Tahta Suci Vatikan karena membahas mengenai perdamaian dan martabat manusia serta menyoroti bahaya perang. Norma perdamaian yang terlembagakan dalam Ensiklik *Pacem In Terris* memuat beberapa konsep dan hal

hal yang harus dan tidak boleh dilakukan dalam menciptakan perdamaian. Dalam membangun perdamaian itu sendiri, terdapat empat pilar yang harus diperhatikan, yakni kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kebebasan.

Keberanan akan terwujud apabila setiap individu mengakui bukan hanya hak pribadinya, namun juga tugasnya kepada orang lain. Keadilan akan terwujud apabila setiap orang menghormati hak dari orang lain dan melaksanakan tugasnya kepada orang lain, dan cinta kasih akan terwujud apabila masyarakat merasakan kebutuhan orang lain sebagai milik mereka dan berbagi apa yang mereka miliki dengan orang lain, terutama mengenai nilai-nilai yang dimiliki. Kebebasan akan membangun perdamaian dan akan berkembang apabila orang-orang bertindak sesuai dengan akal dan memikul tanggung jawab atas tindakan mereka sendiri (Paul, 2003)

Melalui ensiklik ini kemudian mendorong upaya penegakan perdamaian ini bersifat universal, bukan hanya untuk umat Katolik semata, namun untuk semua manusia sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki hak asasi yang tidak dapat dicabut atau diberikan oleh negara. Banyaknya konflik yang terjadi yang merenggut nilai-nilai kemanusiaan jelas sangat bertentangan dengan perdamaian yang selalu diperjuangkan selama ini. Dan untuk mencapai perdamaian itu sendiri sangat tidak menyarankan penggunaan kekerasan, karena hanya akan menambah masalah yang baru. Sebaliknya, ensiklik ini sangat menekankan dan mendorong penyelesaian konflik atau masalah dengan cara-cara yang damai pula. Perdamaian itu sendiri harus bertumpu pada tata tertib atau aturan yang didasarkan pada kebenaran, dibangun atas keadilan, dipelihara serta dijiwai oleh cinta kasih, dan diselenggarakan dalam naungan kebebasan (PT.167) (Holy See Office Press, 1963).

### **Pacem In Terris dan Kebijakan Luar Negeri Vatikan terhadap Perdamaian di Suriah**

Lahirnya kebijakan luar negeri suatu negara selain dipengaruhi oleh lingkungan internasional, namun juga dipengaruhi oleh norma yang dianut oleh negara tersebut. Norma dipandang sebagai harapan bersama tentang perilaku pantas yang dianut oleh kumpulan aktor (Finnemore M. , 1996). Artinya, segala aktor dalam hubungan internasional, terutama negara bertindak karena dituntun oleh adanya aturan atau prinsip atau norma yang telah disepakati untuk memandu negara bertindak baik dan pantas (*logic of appropriateness*). Dalam hal ini, norma bukanlah alat kepentingan, namun menjadi **landasan bagi kepentingan nasional**. Sama halnya dengan Tahta Suci Vatikan, yang didorong oleh norma perdamaian dalam *Pacem In Terris* yang kemudian melandasi tindakan Tahta Suci Vatikan untuk turut serta dalam konflik Suriah. Adapun hal ini dapat dilihat dari ensiklik *Pacem In Terris* yang menekankan pentingnya mencegah perang kembali terjadi karena perang hanya akan menyebabkan bencana dan kehancuran.

*"The calamity of a world war, with the economic and social ruin and the moral excesses and dissolution that accompany it, **must not** on any account be permitted to engulf the human race **for a third time**."*(PT art.112)

Dapat terlihat bahwa bencana dan kehancuran ini jelas sangat tidak diinginkan dan merupakan sesuatu hal yang tidak boleh terulang lagi. Tahta Suci Vatikan memandang bahwa perdamaian adalah hal yang seharusnya diupayakan, dan apabila terjadi perang atau konflik, Tahta Suci Vatikan wajib untuk turut serta berpartisipasi dan membantu menyelesaikannya. Hal ini dikarenakan Tahta Suci Vatikan menganggap hal tersebut adalah hal yang **benar dan pantas** dilakukan mengingat norma yang dianutnya.

Dengan artian, *Pacem In Terris* menjadi **fungsi konstitutif**, yakni mempengaruhi kepentingan Tahta Suci Vatikan untuk memperjuangkan perdamaian.

Adapun tindakan Tahta Suci Vatikan yang turut berpartisipasi dalam konflik Suriah melalui kebijakan luar negerinya merupakan bentuk dari **fungsi regulatif** dari norma *Pacem In Terris* itu sendiri. Fungsi regulatif dimaknai sebagai fungsi norma untuk mengarahkan kebijakan luar negeri, mengenai bagaimana suatu negara harus bertindak terhadap suatu fenomena. Adanya norma *Pacem In Terris* ini kemudian menjadi peta bagi Tahta Suci Vatikan bagaimana ‘seharusnya’ bertindak. Salah satu hal yang harus dilakukan ialah turut menemukan solusi dengan cara yang damai.

*There may be, and sometimes is, a clash of interests among States, each striving for its own development. When differences of this sort arise, they must be settled in a truly human way, not by armed force nor by deceit or trickery. There must be a mutual assessment of the arguments and feelings on both sides, a mature and objective investigation of the situation, and an equitable reconciliation of opposing views*(PT.93).

Hal tersebut menjadi landasan kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan untuk mengajak pihak-pihak terkait dalam penyelesaian konflik secara manusiawi, yang tetap menghormati martabat manusia, sebagaimana yang selalu ditekankan oleh Tahta Suci Vatikan. Adanya norma ini menjadi ‘petunjuk’ bagi Tahta Suci Vatikan untuk menyelaraskan kebijakan luar negerinya yang senantiasa menggunakan pendekatan yang nirkekerasan. Adapun ‘petunjuk’ dari norma ini terlihat dari pengimplementasian kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan, karena Tahta Suci Vatikan tidak hanya akan menunggu kondisi damai akan tercipta sendirinya, yang kemudian terimplementasi dalam berbagai upayanya terhadap penyelesaian konflik Suriah. Adapun kebijakan luar negeri yang Tahta Suci Vatikan untuk mencapai perdamaian di Suriah terwujud dalam tiga bentuk, yakni diplomasi, propaganda, dan bantuan luar negeri.

Diplomasi dilakukan melalui pertemuan dan dialog-dialog damai secara bilateral dengan negara-negara tetangga Suriah di Timur Tengah dan juga negara-negara di Eropa serta secara multilateral dalam beberapa konferensi internasional. Paus Fransiskus mengadakan pertemuan dengan Israel pada April 2013 di Vatikan secara privat yang membahas mengenai permasalahan di Timur Tengah, termasuk mengenai krisis Suriah dan mendukung serta mendorong dilaksanakannya dialog serta rekonsiliasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut (Holy See Press Office, 2013). Selain terhadap Israel, Tahta Suci Vatikan juga melakukan pertemuan dengan Raja Abdullah II selaku Raja Yordania di bulan Agustus 2013. Melalui pertemuan ini, Tahta Suci Vatikan mengajak Raja Abdullah untuk berdialog mengenai kondisi Suriah yang memprihatinkan. Baik Tahta Suci Vatikan dan Yordania sepakat bahwasanya dialog adalah tetap dan menjadi satu-satunya solusi untuk krisis Suriah dan sama-sama menolak gagasan intervensi militer internasional terhadap rezim Bashar Al Assad. Pertemuan keduanya membahas mengenai kondisi sosial dan politik di Timur Tengah, serta mempromosikan “perdamaian dan stabilitas” di wilayah-wilayah yang sedang bermasalah, termasuk Suriah (Holy See Press Office, 2013). Kedua pihak sama-sama mengamini bahwa kekerasan yang terjadi setiap hari menyebabkan hilangnya begitu banyak nyawa manusia dan hidup yang tidak berdaya (Speciale, 2013). Raja dan paus juga menegaskan kembali bahwa jalur dialog dan negosiasi diantara semua komponen masyarakat suriah dengan

dukungan komunitas internasional adalah satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik (Reuters, 2013).

Di tahun 2016, di kala konflik Suriah tak kunjung usai, Tahta Suci Vatikan tak berhenti untuk mempromosikan perdamaian bagi Suriah. Hal ini terlihat dari pertemuan yang diselenggarakan antara Tahta Suci Vatikan dan Presiden Lebanon di tahun 2017. Pertemuan ini berfokus pada pencarian solusi damai terhadap konflik Suriah dengan upaya internasional (Holy See Press Office, 2017). Selain melakukan dialog dengan negara-negara di atas, Tahta Suci Vatikan juga melakukan pertemuan dengan Mesir untuk membahas mengenai situasi sosial dan politik di Timur Tengah, salah satunya Suriah. Sama halnya seperti Lebanon, Paus Fransiskus turut menyampaikan apresiasinya kepada Mesir karena turut membantu Suriah dengan menampung pengungsi dari Suriah. Tahta Suci Vatikan juga mengakui bahwa Mesir memiliki sejarah dan posisi geografisnya yang khusus dan memiliki peran yang tak tergantikan di Timur Tengah dalam konteks negara-negara yang mencari solusi untuk masalah akut dan kompleks yang perlu ditangani secepatnya untuk menghindari kekerasan. Mesir dipandang memiliki tugas tunggal yakni untuk memperkuat dan mengkonsolidasikan perdamaian regional juga, meskipun banyak yang terluka oleh kekerasan membabi buta di tanahnya sendiri. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan Suriah yang mengalami penderitaan di tanahnya sendiri dan membutuhkan bantuan negara-negara tetangganya untuk mengakhiri penderitaan tersebut. Tahta Suci Vatikan juga menekankan bahwa pembangunan, kemakmuran, dan perdamaian adalah hal yang tak tergantikan yang layak dikorbankan. Hal tersebut membutuhkan kerja serius, komitmen yang meyakinkan, langkah yang tepat dan, di atas semua itu, penghormatan tanpa syarat terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut, seperti kesetaraan di antara semua warga negara, kebebasan beragama dan berekspresi, tanpa pembedaan apapun (Holy See Press Office, 2017).

Selain melakukan pertemuan dengan negara-negara di Timur Tengah, Tahta Suci Vatikan juga melakukan pertemuan dengan negara-negara di Eropa, mengingat Eropa merupakan tujuan utama bagi para pengungsi Suriah dalam mencari suaka. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas mengenai dampak yang disebabkan oleh krisis Suriah dan langkah yang harus diambil dalam mengakhiri krisis tersebut. Dalam beberapa kesempatan, Tahta Suci Vatikan melakukan pertemuan dengan perdana menteri Lithuania, Algirdas Butkevičius didampingi oleh Uskup Agung Dominique Mamberti pada September 2013, selain membahas mengenai hubungan keduanya, namun Tahta Suci Vatikan juga membahas mengenai Suriah (Holy See Press Office, 2013). Hal ini juga mengingat disaat yang bersamaan bahwa Lithuania menjabat sebagai presiden Dewan Uni Eropa, sehingga diharapkan dialog tersebut dapat mendorong diskusi damai pula bagi Suriah, mengingat Suriah merupakan masalah internasional dan masalah Eropa yang menjadi kepentingan bersama. Selain ke Lithuania, Tahta Suci Vatikan juga melakukan dialog dengan Hungaria (2013) dan Polandia (2016). Adapun dialog ini membahas mengenai bagaimana Eropa dihimbau untuk turut membantu Suriah, salah satunya menerima pengungsi Suriah dan memperlakukan para pengungsi secara manusiawi. Hal ini sebagai wujud nyata untuk membantu Suriah selain komitmen akan resolusi konflik secara negosiasi atau dialog damai (Holy See Press Office, 2016).

Selain melalui dialog secara bilateral, Tahta Suci Vatikan juga memperjuangkan perdamaian Suriah melalui multilateral, termasuk diantaranya melalui konferensi-konferensi internasional. Konferensi internasional ini termasuk diantaranya Pertemuan Jenewa Kedua di tahun 2014, Sidang Umum PBB ke-72 pada September 2017, Konferensi Mendukung Masa Depan Suriah dan Kawasan pada 04-05 April 2017 di Brussels, hingga

pada sidang ke 73 PBB pada Oktober 2018. Melalui pertemuan multilateral internasional ini, Tahta Suci Vatikan mengajak negara-negara untuk bersatu dalam meraih perdamaian di Suriah sebagai salah satu permasalahan internasional. Tahta Suci Vatikan senantiasa berupaya untuk melakukan dialog dengan pihak-pihak yang berperan dan memiliki pengaruh yang diharapkan dapat membantu mencapai kebaikan bersama, sama halnya yang diamanatkan dalam *Pacem In Terris*, khususnya dalam art ke 118. Dalam bagian tersebut, ditekankan bahwa dalam mencapai kebaikan bersama hendaklah pihak-pihak yang berpengaruh besar mempertimbangkan secara serius masalah di dunia yang lebih manusiawi dalam hubungan antar negara di dunia. Penyelarasan ini harus berdasar pada sikap saling percaya, kejujuran dalam perundingan dan melaksanakan kewajiban. Adapun setiap masalah harus dikasi dari setiap segi sehingga melahirkan persetujuan untuk menggaling perjanjian yang bertahan lama dan menguntungkan (PT.118).

Dalam instrumen propaganda, Paus Fransiskus menggunakan media baru dan media lama dalam mempengaruhi opini masyarakat internasional. Jika diplomasi menysasar pada pemerintah suatu negara, Tahta Suci Vatikan menggunakan propaganda sebagai sarana mempengaruhi publik. Propaganda dalam konteks ini bukanlah dalam konotasi negatif, namun, kembali pada arti dari propaganda itu sendiri, seperti menurut Qualter (1962), propaganda merupakan upaya secara sadar dan sengaja untuk membentuk, mengawasi atau mengubah sikap dari suatu kelompok lain melalui media komunikasi oleh individu atau kelompok tertentu sehingga diharapkan reaksinya akan sesuai dengan keinginan si propagandis. Hal yang sama juga diamini oleh Edward Bernays yang memandang bahwa propaganda bukanlah upaya yang patut dicela dalam meracuni pikiran orang melalui kebohongan, namun merupakan sebuah upaya yang terkelola dalam menyebarkan sesuatu demi mendapatkan opini atau kepercayaan (Combs dan Nimmo, 1994). Jadi, dapat dilihat bahwa sebuah propaganda diartikan lebih umum dan netral serta sebagai usaha ‘persuasi’ yang digunakan untuk mempengaruhi pihak lain melalui media baik media lama atau media baru.

Sama halnya dengan Tahta Suci Vatikan, bertujuan untuk membentuk opini publik internasional bahwa perang merupakan hal yang keji dan harus segera usai. Tahta Suci Vatikan umumnya berupaya untuk mengajak masyarakat umum melalui misa umum dan media sosial yang digunakan oleh pemimpinya, Paus Fransiskus, yakni salah satunya melalui akun resmi twitternya dalam sembilan bahasa. Twitter sebagai salah satu media baru sangat potensial digunakan sebagai sarana propaganda perdamaian Suriah yang dapat dapat menjangkau publik secara internasional. Melalui *tweetnya*, Tahta Suci Vatikan ingin untuk mempengaruhi dan mengajak masyarakat internasional untuk berdoa demi keselamatan Suriah yang kemudian diharapkan mampu mempengaruhi publik agar tidak tinggal diam akan konflik yang menimpa Suriah (Twitter, 2013). Selain itu, Tahta Suci Vatikan juga mengajak masyarakat internasional untuk turut berdoa dan berpuasa demi perdamaian di Suriah melalui beberapa misa umum serta membantu masyarakat Suriah, layaknya seperti perumpaan Orang Samaria yang Baik Hati, yakni untuk membantu sesama manusia tanpa pandang bulu, tanpa mempermasalahkan identitas dan latar belakang.

Instrumen terakhir ialah bantuan kemanusiaan dari Tahta Suci Vatikan pada tahun 2016 senilai \$200.000.000 yang bermanfaat langsung kepada lebih dari 4,6 juta orang di Suriah. Adapun dalam pendistribusian bantuan ini, baik lembaga atau entitas Katolik tidak membedakan identitas agama atau etnis dari mereka yang membutuhkan bantuan dan memprioritaskan yang paling rentan dan paling membutuhkan (Permanent Observer Mission of the Holy See to the UN, 2016). Sebelumnya, di Februari 2016, entitas Gereja

Katolik (keuskupan, badan amal Katolik dan organisasi non-pemerintah) turut memberikan \$150.000.000 dalam bantuan kemanusiaan kepada negara yang terdampak perang di Timur Tengah, salah satunya Suriah (Holy See Press Office, 2016). Tahta Suci Vatikan bekerjasama dengan Gereja Suriah dan dengan dukungan pribadi Paus Fransiskus telah terlibat dalam inisiatif “Rumah Sakit Terbuka”. Adapun fasilitas ini berada di dua pusat di Damaskus dan satu di Aleppo (Vatican News, 2021). Selain itu Tahta Suci Vatikan juga turut memberikan bantuan lain kepada masyarakat Suriah, seperti merenovasi 120 rumah, membantu 85 keluarga membaa sewa setiap bulan, 1.650 keluarga telah menerima makanan dan barang-barang kebutuhan utama setiap bulan, memberikan bantuan pasokan air dan bantuan ekonomi untuk dapat memiliki listrik, turut memberikan bantuan kepada Rumah Sakit Al Rajaa Aleppo beberapa fasilitas kesehatan serta bantuan pendidikan kepada lebih dari 400 anak korban krisis Suriah (Holy See Press Office, 2017).

Seperti pandangan konstruktivis, terutama aliran norma, yang memandang norma sebagai standar perilaku yang baik atau pantas, hal ini menyebabkan adanya pandangan optimis bahwa negara-negara akan bertindak ‘pantas’ di panggung internasional sesuai dengan norma yang telah diadopsi atau dimiliki (Rosyidin, 2020). Berbeda dengan teori realis yang didominasi oleh pandangan *logic of consequences* atau logika konsekuensi yang memperhitungkan untung rugi, konstruktivis justru memandang bahwa negara-negara bertindak didasarkan pada *logic of appropriateness* atau logika kepantasan dan didorong oleh struktur sosial (ideasional:norma). Hal ini dapat dipahami dengan melihat kembali definisi dari norma itu sendiri, yakni mengenai apa yang baik dan pantas serta ‘seharusnya’ dilakukan. Melalui norma ini lah yang kemudian mendefinisikan tanggung jawab dan tugas serta tindakan yang harus dilakukan (Finnemore, 1996).

Kebijakan luar negeri Tahta Suci Vatikan yang turut serta memperjuangkan perdamaian di Suriah apabila dilihat dari kalkulasi untung rugi (*logic of consequences*) dapat dikatakan bahwa Tahta Suci Vatikan akan mengalami kerugian, karena Tahta Suci Vatikan sendiri hanya akan menghabiskan waktu dan tenaganya untuk berdialog dengan para pemimpin negara dan tidak memperoleh keuntungan apa-apa juga dikarenakan tidak akan mengubah posisi Tahta Suci Vatikan menjadi pemain utama dalam panggung internasional. Namun, apabila dilihat kembali, adapun kebijakan-kebijakan Tahta Suci Vatikan dalam memperjuangkan perdamaian di Suriah tidak dapat dilepaskan karena adanya norma *Pacem In Terris* atau Perdamaian di Bumi. Melalui norma ini, Tahta Suci Vatikan memandang bahwa terdapat serangkaian petunjuk yang dianggap benar dan pantas dilakukan. Tahta Suci Vatikan sebagai salah satu negara yang *rule follower* mempercayai bahwa dalam mencapai perdamaian di dunia itu harus dengan cara-cara yang damai pula, seperti yang tercantum dalam *Pacem In Terris* itu sendiri. Salah satunya ialah ketika terjadi perselisihan antara negara, seharusnya diselesaikan dengan perundingan atau persetujuan, bukan dengan senjata (PT.26). Tahta Suci Vatikan yang mengamini hal ini kemudian mempengaruhi tindakannya agar melakukan diplomasi dengan negara-negara agar menghentikan penggunaan senjata yang menyebabkan kesengsaraan bagi rakyat Suriah.

Adanya empat pilar perdamaian yang termaktub dalam *Pacem In Terris* itu sendiri yakni kebenaran, keadilan, cinta kasih, dan kebebasan menjadi poin yang secara tidak langsung senantiasa dibawakan oleh Tahta Suci Vatikan. Senada dengan Finnemore yang menyatakan adanya norma dalam kebijakan luar negeri suatu negara melalui pola perilakunya, pilar perdamaian dalam norma *Pacem In Terris* juga selalu menjadi ciri dari kebijakan Tahta Suci Vatikan itu sendiri. Penekanan terhadap dialog, negosiasi,

rekonsiliasi, bantuan kemanusiaan, seruan akan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional menunjukkan adanya pengaruh dari norma *Pacem In Terris* itu sendiri, dimana Tahta Suci Vatikan berkepentingan untuk mewujudkan perdamaian di bumi melalui cara-cara yang damai dan tetap menghormati hak asasi manusia. Terjadinya konflik Suriah yang merusak perdamaian itu sendiri kemudian mempengaruhi kebijakan Tahta Suci Vatikan untuk melakukan diplomasi baik secara bilateral atau multilateral, propaganda untuk meraih dukungan masyarakat internasional hingga pemberian bantuan kemanusiaan untuk membantu Suriah yang terdampak konflik.

## **KESIMPULAN**

Tahta Suci Vatikan dalam mengupayakan perdamaian akan konflik Suriah dipengaruhi oleh adanya norma *Pacem In Terris* atau dikenal sebagai norma perdamaian di bumi. Melalui adanya norma yang terlembagakan ini sebagai salah satu norma domestik di Tahta Suci Vatikan ini kemudian mempengaruhi kebijakan dan kepentingan Tahta Suci Vatikan untuk turut berpartisipasi dalam memperjuangkan perdamaian di Suriah. Pada bagian inilah norma memiliki fungsi sebagai fungsi konstitutif, yakni mempengaruhi kepentingan aktor yang dilandasi dari norma yang diamini. Tahta Suci Vatikan mempersepsikan bahwa melalui adanya norma *Pacem In Terris* yang telah dimilikinya mempengaruhinya untuk sepantasnya membantu Suriah, tetapi dengan harus cara yang damai juga.

Karena Tahta Suci Vatikan mengamini adanya perdamaian dengan cara yang damai juga seperti yang terdapat di *Pacem In Terris* itu sendiri, kemudian menjadi petunjuk atau peta mengenai bagaimana Tahta Suci Vatikan harus bertindak. Disinilah norma berfungsi sebagai fungsi regulatif, yakni sebagai 'peta' yakni mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Sesuai dengan 'resep' yang terdapat dalam *Pacem In Terris* itu sendiri, Tahta Suci Vatikan mengadopsi cara-cara yang disarankan oleh norma tersebut, seperti memperjuangkan perdamaian ketika terjadi konflik karena percaya manusia merupakan saudara bagi manusia lainnya, sehingga sudah seharusnya saling membantu secara manusiawi dan damai. Hal ini kemudian berimplikasi pada kebijakan Tahta Suci Vatikan yang selalu memperjuangkan perdamaian dengan pendekatan yang damai, seperti diplomasi untuk melakukan dialog dan mengajak pihak-pihak terkait melakukan negosiasi dan rekonsiliasi, propaganda dengan mengajak masyarakat internasional untuk turut serta peduli terhadap penderitaan Suriah dan memberikan berbagai bantuan kemanusiaan sebagai bukti nyata lain Tahta Suci Vatikan dalam mewujudkan perdamaian di Suriah. Hal ini dilakukan karna adanya *logic of appropriateness* atau logika kepantasan dengan pandangan bahwa perdamaian dengan cara-cara damai merupakan hal yang seharusnya dan pantas dilakukan oleh Tahta Suci Vatikan.

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing 1, Bapak Muhammad Faizal Alfian S.I.P., M.A selaku dosen pembimbing 2, serta Ibu Dr.Dra. Reni Windiani, M.S selaku dosen penguji yang telah membimbing penulis sehingga jurnal penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- Adolphe, J. (2007). The Pope's Peace And Security Council Resolution 1325. *Ave Maria Law Review*, 5(2), 436.
- Al Jazeera. (2020, Desember 17). *What is the Arab Spring, and how did it start?* Retrieved Mei 16, 2022, from <https://www.aljazeera.com/news/2020/12/17/what-is-the-arab-spring-and-how-did-it-start>
- Finnemore, M. (1996). *National Interest in International Society*. Ithaca: Cornell University Press.
- Ford, R. S. (2019). The Syrian Civil War: A New Stage, But Is It The Final One? *The Middle East Institut*, 1-18.
- Gordon, M. R. (2017). *U.S. Is Sending 400 More Troops to Syria*. Retrieved Mei 06, 2021, from <https://www.nytimes.com/2017/03/09/world/middleeast/us-troops-syria.html>
- Herlambang, B. M. (2015). Peranan Dewan Keamanan PBB Untuk Menghentikan Kejahatan Perang Yang Dilakukan pada Pihak yang Bertikai dala Konflik Bersenjata di Suriah. *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, 1-15.
- Himes, K. (2014). Papal Thinking about Peace Since Pacem in Terris: The World Day of Peace Messages, 1967-2013. *Journal Of Catholic Social Thought*, 11(1), 19.
- Holy See Press Office. (t.thn). *Encyclical: Pacem In Terris*. Retrieved Maret 14, 2022, from [https://www.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf\\_j-xxiii\\_enc\\_11041963\\_pacem.html](https://www.vatican.va/content/john-xxiii/en/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html)
- Holy See Press Office. (2013, April 30). *Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente dello Stato di Israele Shimon Peres*. Dipetik Maret 2022, dari <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/04/30/0262/00591.html#TRADUZIONE%20IN%20LINGUA%20INGLESE>
- Holy See Press Office. (2013, Agustus 29). *Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Re e alla Regina di Giordania*. Dipetik Maret 22, 2022, dari <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/08/29/0539/01186.html>
- Holy See Press Office. (2013, September 19). *omunicato della Sala Stampa: Udienza al Primo Ministro di Lithuania*. Dipetik Maret 24, 2022, dari <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2013/09/19/0587/01302.html>
- Holy See Press Office. (2016, Februari 04). *Intervento Dell'arcivescovo Paul Richard Gallagher, Segretario Per I Rapporti Con Gli Stati*. Dipetik Maret 30, 2022, dari [https://www.vatican.va/roman\\_curia/secretariat\\_state/2016/documents/rc-seg-st-20160204\\_gallagher-londra\\_it.html](https://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2016/documents/rc-seg-st-20160204_gallagher-londra_it.html)
- Holy See Press Office. (2016, November 01). *“Conferenza di Papa Francesco nel Volo di Ritorno dal Viaggio Apostolico in Svezia in Occasione della Comemorazione Omuncce Luterano-Cattolica della Riforma*. Dipetik Maret 25, 2022, dari <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/11/01/0789/01764.html>
- Holy See Press Office. (2017, Maret 16). *Comunicato della Sala Stampa: Udienza al Presidente della Repubblica del Libano*. Dipetik Maret 22, 2022, dari <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/16/0158/00373.html>
- Holy See Press Office. (2017, Maret 18). *Appello per la Colletta dei Cristiani di Terra Santa*. Dipetik Maret 30, 2022, dari

- <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/03/18/0163/00385.html#rapeng>
- Holy See Press Office. (2017, April). *Viaggio Apostolico Del Santo Padre Francesco In Egitto*. Dipetik Maret 22, 2022, dari [https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco\\_20170428\\_egitto-autorita.html](https://www.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/april/documents/papa-francesco_20170428_egitto-autorita.html)
- Human Right Watch. (2019). *World Report 2019 / Country Chapters Syria*. New York: Human Right Watch.
- Hurrel, A. (2002). Norms and Ethics in International Relations. Dalam W. Carlsnaes, T. Risse, & B. A. Simmons, *Handbook of International Relations* (hal. 194). London: SAGE Publication.
- Kamrullah, M. R., & Rivai, A. N. (2019). Dampak Intervensi Aktor-Aktor Eksternal Dalam Mempengaruhi Durasi Perang Sipil Di Suriah. *Review of International Relations*, 1(2), 170.
- Kieser, B. (1993). *Solidaritas 100 Tahun Ajaran Sosial Gereja*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kowert, P., & Legro, J. (1996). Norms Identity and Their Limits. Dalam e. Peter Katzenstein, *The Culture of National Security, Norms and Identity in World Politics* (hal. 463). New York, Columbia: Columbia University Press.
- Kusumastuti, D. A. (2017). Alasan Rusia Melibatkan Diri dalam Konflik Bersenjata Suriah Tahun 2011-2015. *Journal of International Relations Universitas Diponegoro* 3(4) 143-150.
- Mahasin. (2017). Peran Dewan Keamanan Pbb Dalam Konflik Internasional (Studi Kasus Konflik Syria). *Skripsi*. Universitas Hasanudin
- Newman, L. A. (2019). The Holy See and the Syrian Refugee Crisis: A Study of the Catholic Church's Soft Power. *Honors Theses*.
- Qualter.(1962). *Propaganda and Psychological Warfare*. New York: Random House
- Permadi, D. R. (2019). Peran Tiongkok Dalam Konflik Suriah: Perspektif Teori Quasi Mediation. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia.
- Permanent Observer Mission of the Holy See to the UN. (2016, September 21). *Archbishop Gallagher At High-Level Meeting On The Syrian Crisis*. Dipetik Maret 30, 2022, dari <https://holyseemission.org/contents//statements/59c5038671c81.php>
- Rosyidin, M. (2012). Mengapa tidak berperang? Norma Politik Luar Negeri Cina dan Konflik Laut Cina Selatan. *Andalas Journal of International Studies*, 1(2), pg.131-157
- Rosyidin, M. (2015). *The Power Of Ideas*. Sleman: Tiara Wacana.
- Rosyidin, M. (2020). *Teori Hubungan Internasional : Dari Perspektif Klasik sampai Non-Barat*. Depok: Rajawali Pers.
- Twitter. (2013, September). *Pope Francis Status On Twitter*. Diambil kembali dari <https://twitter.com/Pontifex/status/374466943312330753>
- Rivera, A. F. (2016). The Holy See and International Conflict Resolution and Peacekeeping. *The Antoninus Journal*. 2(1).106-129
- Vatican News. (2021, January 09). *Nuncio to Syria: "weapon of charity" heals physical, economic and social wounds*. Dipetik Maret 30, 2022, dari <https://www.vaticannews.va/en/church/news/2021-01/syria-nuncio-zenari-healing-rebuilding-hope.html>
- VOA Indonesia. (2018). *PBB-Uni Eropa Berupaya Hidupkan Kembali Proses Perdamaian Suriah*. Retrieved Mei 2021, from

<https://www.voaindonesia.com/a/pbb-uni-eropa-berupaya-hidupkan-kembali-proses-perdamaian-suriyah/4363268.html>

Wendt, A. (1999). *Social Theory Of International*. Cambridge: Cambridge University Press.